

POLA KOMUNIKASI PEREMPUAN DALAM MENGKONSTRUKSI IDENTITAS GENDER PADA GERAKAN PKK

Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi

Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret Surakarta

rhesa.pratiwi@gmail.com

Abstract

Background: Gender, forms of equality between men and women actually become the essence to be achieved by PKK. As a feminine movement, PKK carries an effort to fight the active role of women, especially in family range. But in the other hand, PKK gives the rise to certain stereotypes as a movement between state power liaison with a number of aspect of life in the grassroot. As a result, it's appearing social of womanhood as an intermediary for hegemony of state of the environment sectors, which further confirms the subordination of women social role.

Results: By doing analysis of I and Me in concept of symbolic interactionism, the formation of gender identity in PKK turned to the production and reception of messages by the boards and members of PKK. The process of message production had been conveyed through rhetorical message design logic by the boards of PKK as a communicator. Then, for the process of message reception, amount of information had been received in negotiatic position by the members of PKK as a communicant. Later, in relation to the empowerment of women, stated that the PKK tends to carry the form of state empowerment, and do not yet for the whole self-empowerment of community.

Keywords: *PKK, communication pattern, gender identity, women's empowerment*

Abstrak

Latar Belakang: Gender, bentuk-bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya menjadi pokok yang harus dicapai oleh PKK. Sebagai gerakan feminis, PKK membawa upaya untuk memperjuangkan peran aktif perempuan, khususnya dalam lingkup keluarga. Akan tetapi, di lain pihak, PKK melahirkan stereotype-stereotype tertentu sebagai sebuah gerakan antara hubungan kekuasaan negara dengan sejumlah aspek kehidupan pada akar rumput. Akibatnya, ini adalah tampilan sosial kewanitaan sebagai perantara untuk hegemoni keadaan sektor-sektor lingkungan, yang selanjutnya menegaskan subordinasi peran sosial perempuan.

Hasil: Dengan melakukan analisis *I and Me* pada konsep interaksionisme simbolis, pembentukan identitas gender pada PKK beralih ke produksi dan penerimaan pesan-pesan oleh badan-badan dan anggota PKK. Proses produksi pesan telah disampaikan melalui logika perancangan pesan retorika oleh badan-badan PKK sebagai komunikator. Selanjutnya, untuk proses resepsi (penerimaan) pesan, jumlah informasi telah diterima dalam posisi negosiasi oleh para anggota PKK sebagai komunikan. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, menyatakan bahwa PKK cenderung membawa bentuk pemberdayaan negara, dan bukan untuk pemberdayaan diri masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: PKK, pola komunikasi, identitas gender, pemberdayaan perempuan

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang posisi perempuan di masyarakat, terutama dalam dikotomi publik dan privat (domestik), Abdullah (1997) menyebutnya sebagai sosok yang cenderung identik dengan dunia domestik. Hal ini berkenaan dengan peran perempuan yang muncul dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu dan istri di dalam rumah tangga.

Meneguhkan adanya konstruksi sosial perempuan di dalam masyarakat, secara normatif membentuk pemikiran pasti tentang bagaimana cara kita memandang perempuan. Terlepas dari sejumlah perkembangan globalisasi yang menjadikan perempuan untuk lebih bebas dalam berekspresi, pada kenyataannya pemahaman ini masih terbatas dengan nilai-nilai sosial tertentu yang secara tidak langsung membentengi pemikiran masyarakat dalam mengkonstruksikan seorang perempuan.

Berangkat dari pemikiran di atas, muncul adanya semangat untuk membebaskan perempuan atas perlakuan dan stereotif yang diterimanya, salah satunya adalah melalui mewujudkan kesetaraan bagi perempuan melalui pemberdayaan. Ruslan (2010: 80) memandang upaya pemberdayaan sebagai proses yang menjadikan perempuan untuk mampu menentukan pilihannya secara mandiri dan bijaksana. Konsep ini menawarkan titik terang terhadap posisi dan peran sosial perempuan yang setara dengan laki-laki, terbebas dari kemiskinan, kebodohan, serta sejumlah faktor yang mampu menghambat pengembangan diri para perempuan, dan PKK muncul sebagai salah satu alternatif dalam konsep pemberdayaan perempuan ini.

Gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang terfokus pada pembangunan masyarakat. Secara sederhana, gerakan ini tumbuh dari bawah, dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat guna mewujudkan keluarga sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berbudi luhur, sehat, mandiri, sekaligus mencerminkan adanya kesetaraan gender dan kesadaran hukum. Dengan mengusung visi sebagai upaya pemberdayaan keluarga, diperluas melalui konsep pendidikan, pembinaan, serta pelatihan yang terpusat pada 10 program pokok PKK, PKK sebagai gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diharapkan mampu menjadi arah

perubahan untuk mewujudkan peran serta aktif perempuan di dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Keberadaan PKK, di pihak lain justru memunculkan stereotif tertentu sebagai gerakan yang menghubungkan antara kekuasaan negara dengan aspek sosial, budaya, ideologi, politik, serta ekonomi, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Suryakusuma (2011) menjelaskan adanya konstruksi sosial keperempuanan yang diungkap sebagai konsep perantara hegemoni negara terhadap sektor-sektor lingkungan. Hal ini muncul di dalam praktik kegiatan dan struktur PKK sehingga pada akhirnya justru meneguhkan peran sosial perempuan yang semakin ter subordinasi di dalam wilayah domestiknya.

Menilik pada munculnya sejumlah kecenderungan perlakuan terhadap perempuan di masyarakat, subordinasi gender menjadi salah satu persoalan, yang mana menurut Fakih (2013) muncul karena adanya ketimpangan gender bagi perempuan. Lebih lanjut, Ndemo dan Maina (2007) dalam Millie dan Bellamy (2014: 91) mengidentifikasi bentuk pembatasan bagi perempuan yang mana dirasa mampu memunculkan sistem deskriminasi sehingga kemiskinan semakin meningkat, sistem ekonomi negara menjadi stagnan, serta rendahnya standar kehidupan masyarakat. Adanya pemarginalan terhadap perempuan pada dasarnya dilakukan melalui pembatasan partisipasi mereka dalam bidang ekonomi sehingga ini berdampak pada semakin buruknya posisi perempuan di dalam masyarakat, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan kualitas penduduk secara keseluruhan.

Adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan nyata menjadi salah satu esensi yang diperjuangkan melalui PKK, terutama melalui peran perempuan di dalam pengelolaan keluarga. Namun, kontradiksi muncul di saat PKK diyakini hanya identik dengan perempuan sehingga adanya peran dan fungsi sosial yang dijalankan hanya terbatas pada konteks keluarga dan rumah tangga. Sebut saja ketika secara organisasional, jabatan Ketua TP PKK pada tingkat tertentu melekat otomatis fungsional pada istri pejabat pemerintahan setempat. Dalam hal ini, keaktifan perempuan di dalam PKK secara tidak langsung berasal dari kuasa laki-laki (suami) di dalam pemerintahan sehingga adanya penghargaan yang muncul bagi diri seorang perempuan adalah karena status terberi sebagai seorang istri dan bukan lebih kepada pencapaian ataupun prestasi yang dimilikinya secara personal. Asumsinya, PKK pada akhirnya muncul dan identik dengan konsep patriarki yang tak ubahnya menegaskan kuasa laki-laki atas perempuan dalam segala sektor.

Gender pada dasarnya dikonsepsikan dalam teori bersifat diskursif, yang mana tidak mengarah pada sifat ataupun ciri khas yang melekat pada diri seseorang. Elisabeth K. Kelan (2008) mengidentifikasi gender sebagai pandangan lebih luas mengenai konstruksi sosial yang berpusat pada pemahaman tentang gender dan sosial masyarakat. Selain itu, pandangan diskursif mengenai gender juga mengarah pada pemunculan wacana yang mengkonstruksi ataupun menciptakan subjek gender yang utama.

Gender sebagai identitas, dalam kaitannya dengan komunikasi dapat diidentifikasi melalui sosialisasi atas nilai-nilai gender yang disebarakan. Lebih lanjut, muncul konsep *gender socialization*, dimana perempuan terikat dengan nilai dan norma yang dibangun di masyarakat, dan melalui PKK, keberadaannya muncul sebagai gerakan yang melahirkan wacana gender dan mengkonstruksi posisi perempuan untuk diharuskan menjadi sosok yang ideal sesuai perspektif masyarakat.

Pembentukan identitas di dalam PKK pada dasarnya tidak terlepas dari proses komunikasi yang terjadi di PKK. Adanya konstruksi identitas di dalam PKK lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana proses produksi dan penerimaan pesan berlangsung di dalam gerakan PKK, terkait sejauh mana para pengurus dan anggota PKK mampu berkontribusi dalamnya. Sebagai implikasi, apakah melalui identitas gender ini, selanjutnya benar-benar mampu memberdayakan perempuan secara keseluruhan atau tidak.

Guna mendukung analisis data, pendekatan teori yang digunakan adalah:

1. Kajian komunikasi, meliputi komunikasi sebagai proses, *message production* dan *message reception*, serta komunikasi interpersonal dan organisasi.
2. Konsep interaksionisme simbolik.
3. Identitas dan konsep diri.
4. Kajian gender, berkenaan dengan gender sebagai konstruksi sosial, serta gender, gender pembangunan, dan gender pemberdayaan.

Secara umum, penelitian ini berupaya mendeskripsikan serta menganalisis pola komunikasi pada gerakan PKK dalam mengkonstruksi identitas gender dan pemberdayaan perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejumlah rumusan masalah melalui batasan:

1. Karakteristik identitas gender di PKK melalui analisis *I and Me*.
2. Proses produksi dan penyampaian pesan melalui peran pengurus PKK sebagai komunikator.
3. Proses penerimaan pesan melalui peran anggota PKK sebagai komunikan.
4. Konstruksi identitas gender melalui pola komunikasi yang dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case study*) deskriptif. Jenis penelitian mengarah pada penelitian kualitatif, dengan menekankan pada aspek spesifikasi unit ataupun kasus yang diteliti. Pawito (2007:141) memaknai studi kasus sebagai metode yang berorientasi pada sifat-sifat unik atau kasual dari sejumlah unit yang sedang diteliti dan berkenaan dengan masalah yang menjadi fokus perhatian. Dalam hal ini, Creswell (2007:73) lebih menekankan studi kasus sebagai pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk bertindak eksploratif secara terbatas, baik dalam satu kasus (*a case*) maupun beberapa kasus (*cases*).

Terkait penjelasan di atas, studi kasus yang dilakukan di dalam penelitian ini bersifat jamak dengan mengambil dua lokasi penelitian, yakni pada gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis. Dengan dilatarbelakangi atas kultur budaya dan kondisi sosial yang berbeda, kedua kelurahan lokasi ini dipilih sebagai lokasi-lokasi yang dipandang penulis mampu memberikan kelengkapan tertentu terhadap hasil penelitian yang ditemukan.

Pelaksanaan penelitian kurang lebih berlangsung selama tiga bulan, dimana dalam teknik pengumpulan data yang digunakan, secara langsung peneliti akan melakukan *indepth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pengurus dan anggota PKK di kedua lokasi. Melengkapi dua teknik pengumpulan data di atas, peneliti juga melakukan observasi dan pengumpulan dokumen relevan terhadap penelitian.

Untuk *sampling* yang digunakan, peneliti menggunakan *purposive sampling* guna memperoleh kedalaman atas data yang diperoleh. Sifat *sampling* berkembang sesuai kebutuhan, dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan atas dasar ketercukupan informasi yang dimilikinya.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan teknik analisis data interaktif gagasan Miles dan Huberman, yang memuat unsur: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Pawito, 2007:104). Guna menguji data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Patton dalam Sutopo (2002:79) menyatakan teknik ini sebagai teknik yang mengedepankan sumber data berbeda dalam menguji kebenaran ataupun validitas suatu data, terutama pada data-data yang bersifat sama dan sejenis.

PEMBAHASAN

Konstruksi Identitas Gender: Analisis *I and Me*

Wood (2000) menjelaskan adanya pembentukan identitas terbangun dalam lingkungan sosial melalui perilaku individu (behavioral). Dalam hal ini, munculnya aktivitas simbolik sebagai perilaku individu muncul dari perpaduan antara karakter dan pemikiran manusia. Adanya pembentukan identitas pada diri individu dinyatakan berkenaan dengan hubungan serta interaksi antar individu, dimana interaksi ini memuat aspek simbolik dari individu dan dipandang sangat mempertimbangkan karakter serta ciri khas nyata yang berhubungan dengan pemikiran setiap manusia dan lingkungan sosialnya.

Keberadaan simbol-simbol di dalam kehidupan individu dapat dikatakan sebagai dasar dari identitas individu dan kehidupan sosialnya (Mead dalam Wood, 2000:96). Bagaimana setiap personal individu saling berinteraksi, berkomunikasi dengan bahasa, saling mempertukarkan makna dengan perspektif masing-masing, hal inilah yang selanjutnya mengarah ke dalam bentuk interaksionisme simbolik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, unsur interaksionisme simbolik yang dirasa paling dominan adalah prinsip *I and Me*.

Kapasitas *I* (Aku), individu menempatkan dirinya sebagai subjek ataupun pelaku utama komunikasi melalui identitas yang dibentuknya. *I* dimaknai sebagai diri yang subjektif dan reflektif mengartikan situasi yang ada di sekitarnya. Konsep *I* dalam hal ini adalah kecenderungan impulsif individu untuk berperilaku melalui suatu cara yang tidak terorganisasikan, tidak terarah, serta lebih bersifat spontan (Mulyana, 2013:88).

Perspektif lain, ketika individu memahami diri pribadi sebagai objek ataupun sasaran dalam interaksi dan komunikasi yang terjalin, dapat dikatakan bahwa ia akan lebih menonjolkan prinsip *Me*. Prinsip ini mengarahkan individu yang berperan sesuai dengan sikap orang lain. *Me* memungkinkan individu untuk menjadi diri sosial yang selalu diawasi dan diperhatikan oleh orang lain. Lebih jelas, ini dapat dilihat ketika seorang individu berada dalam suatu kelompok sosial tertentu (Mulyana, 2013:88).

Prinsip *I and Me* menempatkan para perempuan di PKK dalam memosisikan diri mereka, apakah sebagai subjek atau sebagai objek dalam interaksi serta proses komunikasi yang dilakukan. Keberadaan perempuan sebagai *I* dalam komunikasi mengarahkan sudut pandang dominan dimana perempuan memiliki *side* dalam membentuk identitas yang mereka pahami. Perempuan sebagai *Me*, di pihak lain menentukan bagaimana mereka melihat diri mereka sebagai sasaran komunikasi sehingga cenderung kurang menonjol dalam setiap interaksi yang dilakukan. Meskipun begitu, analisis *I and Me* tidak ditentukan sebagai pertentangan, melainkan lebih kepada pelengkap tentang bagaimana setiap individu mempersepsikan sebuah karakteristik identitas yang dimiliki.

Baik pengurus maupun anggota PKK, keduanya memahami karakteristik *I* pada dirinya melalui sejumlah manfaat yang mendorong pihaknya untuk ikut serta di dalam PKK. Dalam hal ini, sejumlah manfaat tersebut menjadi semacam keinginan yang ingin pengurus dan anggota capai ketika mengikuti PKK. Analisis dalam karakteristik *I*, antara lain adalah:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan dan pendidikan keluarga, administrasi PKK bagi pengurus, maupun kesehatan.
2. Adanya keikutsertaan di dalam PKK diharapkan dapat menunjang ketentraman dan kesejahteraan keluarga.
3. Memupuk silaturahmi antar warga masyarakat serta menambah keterampilan tertentu bagi masyarakat guna mendukung bentuk pemberdayaan dalam program PKK.

Untuk analisis *Me*, pemahaman para pengurus dan anggota PKK dinyatakan beragam. Dalam analisis *Me*, pemahaman pengurus terhadap karakteristik identitas gender di PKK adalah:

1. PKK identik dengan perempuan. Hal ini menjadikan mayoritas anggota PKK adalah perempuan, meskipun sosok laki-laki pada dasarnya juga dapat diikutsertakan di dalam PKK. Namun, keikutsertaan laki-laki di dalam PKK cenderung kurang ketika dibandingkan perempuan.

2. Ketua PKK dijabat oleh istri dari pejabat pemerintahan. Terutama pada Ketua PKK Kelurahan, Ketua TP PKK Kelurahan melekat fungsional pada istri Lurah atau Kepala Desa. Sedangkan posisi suami (Lurah atau Kepala Desa) adalah sebagai Dewan Penyantun di PKK. Hal ini menjadikan gerakan PKK erat kaitannya dengan pemerintah.
3. PKK dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang bertugas untuk menyukseskan program pemerintah sehingga menjadikan setiap program di PKK menjadi seragam.
4. Pengurus PKK adalah motor penggerak program PKK. Terkhusus bagi perempuan, posisinya dinyatakan sebagai penggerak utama dalam implementasi 10 program pokok PKK.
5. Pengurus PKK dipilih oleh Ketua PKK berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kemampuan, dimana dalam pemilihannya, pengurus yang dapat berasal dari perangkat kelurahan atau masyarakat biasa.

Lebih lanjut, pemahaman anggota PKK terhadap karakteristik identitas gender melalui analisis *Me* adalah:

1. Perempuan dan keluarga merupakan sasaran utama PKK. Posisi perempuan diyakini lebih diwajibkan untuk menjadi anggota PKK dibandingkan laki-laki, terutama pada kelompok PKK RT dan RW.
2. Anjuran untuk melaksanakan 10 program pokok PKK di dalam keluarga dan masyarakat.

Message Production: Pengurus PKK sebagai Komunikator

Posisi pengurus PKK Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis dijelaskan sebagai komunikator pesan yang bertugas untuk memproduksi pesan informasi, baik itu berupa program, arahan kegiatan, penyuluhan, maupun sosialisasi yang akan dilaksanakan di dalam PKK. Produksi pesan ini dijelaskan oleh Miller (2005:105) sebagai cara menyusun dan menyandikan sebuah "persetujuan" atas pesan informasi yang dihasilkan, sekaligus menjawab seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan pesan-pesan yang dihasilkan. Terkait hal ini, posisi komunikator adalah aktor utama yang bertugas mengelola pesan agar dapat disampaikan dengan baik kepada komunikan.

Mengingat pentingnya keberadaan komunikator dalam proses produksi pesan, secara sederhana, posisi komunikator dalam produksi pesan dinyatakan memiliki pengetahuan yang luas, lengkap dengan tujuan yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Komunikator juga memiliki kemampuan untuk mengelola, menyesuaikan, serta mengkoordinasi perilaku terhadap lawan bicaranya. Kemampuan mengelola pesan oleh komunikator dapat didukung dengan beberapa strategi tertentu guna menghasilkan hubungan dan interaksi antar individu.

Terkait uraian di atas, posisi perempuan sebagai pengurus PKK dipandang memiliki peran tersendiri sekaligus sejumlah karakteristik sebagai identitas yang mengukuhkan posisi mereka sebagai komunikator. Dalam hal ini, pengurus PKK harus

memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kecakapan yang memadai, guna mendukung peran dan tanggung jawab mereka sebagai komunikator. Adanya kompetensi ini akan sangat diperlukan dalam penyusunan strategi serta logika dalam proses produksi pesan.

Dengan demikian, sejumlah kategori yang dianalisis dalam proses produksi pesan guna mengetahui peran pengurus PKK sebagai komunikator pesan, adalah:

1. Strategi penyampaian pesan

Pengurus PKK menyampaikan pesan informasi secara langsung kepada anggota PKK, sekaligus bertahap melalui sejumlah perantara, salah satunya melalui Ibu RT dan Ibu RW selaku Ketua Kelompok PKK RT dan RW. Pesan informasi juga disampaikan sesuai dengan konteks masyarakat sehingga pelaksanaan program diharapkan dapat terimplementasi secara optimal sesuai kondisi masyarakat serta mampu mengikat anggota agar tetap loyal dalam mengikuti PKK.

Lebih lanjut, adanya logika desain pesan yang digunakan sebagai strategi produksi pesan oleh pengurus PKK mengarah pada logika desain pesan *retorika*, dimana penyampaian pesan informasi lebih fleksibel dan mampu menciptakan konteks tertentu di dalam proses komunikasi. Logika *retorika* adalah logika desain pesan yang memungkinkan adanya kreasi atau negosiasi antara lingkungan sosial yang melingkupi dengan aspek sosial individu. Asumsinya, bagaimana para pengurus PKK memproduksi dan menyampaikan pesan kepada anggota PKK dan masyarakat, proses komunikasi yang berjalan akan berperan sebagai sesuatu yang mampu menciptakan konteks di dalam gerakan PKK agar dapat dimaknai sesuai dengan perspektif mereka masing-masing.

2. Alur penyampaian pesan

Pada dasarnya, perencanaan program kegiatan PKK disusun secara *bottom-up* sesuai dengan Hasil Rakernas PKK Pusat Tahun 2010. Penyusunan program kegiatan PKK secara awal disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di masyarakat, mengingat PKK adalah gerakan yang cukup mampu bersentuhan langsung dengan rakyat yang menjadi sasarannya. Namun, adanya aliran informasi yang terjadi di dalam PKK justru cenderung mengarah ke *top-down*, dimana komunikasi berlangsung dari pihak atas—yaitu PKK Pusat—ke bawah—PKK tingkat terendah dan masyarakat.

Pemahaman di atas kembali menjelaskan PKK sebagai organisasi yang erat kaitannya dengan pemerintah. Terlepas dari sifatnya yang independen, struktur kepengurusan di PKK pada dasarnya terikat dengan sistem pemerintahan, begitu pula dengan pelaksanaan program kegiatannya. Hal inilah yang secara organisasional menjadikan komunikasi di PKK lebih mengarah pada pola *top-down*.

3. Saluran komunikasi

Penggunaan saluran komunikasi (*communication channel*) dapat dimaknai ketika pesan diperoleh dari satu individu ke individu lainnya (Rogers, 1983:17). Penggunaan saluran komunikasi terbagi ke dalam dua jenis, yakni saluran media

massa (*mass media channels*) seperti radio, TV, dan koran; serta saluran interpersonal (*interpersonal channels*) yang mengarah pada hubungan dan interaksi langsung (*face to face*) antara dua atau lebih individu (Rogers, 1983:18).

Untuk saluran komunikasi yang digunakan dalam proses penyampaian pesan diidentifikasi ke dalam dua jenis saluran komunikasi, yakni saluran komunikasi non-media dan saluran komunikasi media. Saluran komunikasi non-media dapat berupa forum komunikasi, seperti pertemuan rutin PKK dan rapat. Sedangkan saluran komunikasi media, saluran komunikasi ini berupa media telepon, sms, serta layanan ponsel yang biasa digunakan dalam proses penyampaian pesan.

4. Hambatan penyampaian pesan

Adanya hambatan dalam penyampaian pesan lebih mengarah pada aspek personal, yakni: keterbatasan pengurus PKK dalam pemahaman materi kegiatan PKK dan keaktifan anggota PKK dalam menerima materi yang disampaikan pengurus.

Message Reception: Anggota PKK sebagai Komunikan

Mengenai proses penerimaan pesan di dalam komunikasi, Miller (2005:124) menjelaskan adanya pemahaman mengenai *message processing* sebagai proses dimana pesan-pesan informasi lengkap dengan tipe tertentu dapat diterima oleh para komunikan. Bagaimana pesan informasi dapat diproses dan diterima oleh sasaran komunikasi, sebelumnya akan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan sumber pesan sehingga dalam prosesnya, dimungkinkan terjadi pemengaruhan, baik itu terkait perilaku atau pandangan tertentu terhadap pesan yang diterima.

Miller (2005: 125-127) menyatakan tiga model persuasi dalam proses penerimaan pesan, yaitu: teori disonansi kognitif, teori tindakan beralasan, dan teori penilaian sosial. Namun, bertolak dari adanya sejumlah teori persuasi tersebut, Stuart Hall (1993) menyatakan perspektifnya mengenai prinsip *decoding-encoding* yang menjelaskan bahwa makna yang muncul dalam pesan informasi akan disandikan oleh komunikator, untuk kemudian diuraikan sehingga mampu dipahami oleh komunikan. Proses ini memungkinkan pemaknaan kembali oleh komunikan sebagai bentuk pemahaman pesan.

Adanya makna dan pesan yang disampaikan dalam komunikasi dipandang Hall (1980:128-129) sebagai seperangkat tanda dan sarana yang khusus serta terorganisasi. Konsep ini menegaskan bahwa substansi di dalam pesan sangat penting dalam bentuk pengakuan atas pesan itu sendiri. Dengan demikian, proses pemaknaan cenderung bersifat pasti dan tetap ketika berkaitan dengan proses komunikasi secara keseluruhan. Hall (1993:101-103) lebih jelas menempatkan posisi komunikan ini dalam kapasitas pesan media, terutama konteks kultural media TV. Namun, penelitian ini bermaksud menjelaskan penerimaan pesan dalam konteks komunikasi langsung di PKK, apakah kemudian para anggota PKK akan berada dalam posisi *dominant-hegemonic*, *negotiativ*, atau *oppositional*.

1. Posisi anggota PKK

Pesan diterima secara langsung dan bertahap oleh anggota PKK melalui kegiatan ataupun program PKK. Serupa dengan konteks penyampaian pesan, pesan selanjutnya diterima sesuai dengan pemahaman personal anggota PKK sehingga mampu *follow up* sebagai masukan dan usulan dari para anggota. Dalam hal ini, adanya *feedback* dari para anggota PKK mengarahkan posisi mereka sebagai komunikator dalam bentuk *negotiation*. Asumsinya, posisi ini mengidentifikasi bahwa komunikator memiliki batasan pandangan sosial tertentu atas pesan informasi yang diterimanya. Batasan inilah yang mengarahkan anggota PKK ini untuk dapat memberikan filter atas pesan informasi apa yang menurut mereka baik dan bermanfaat, salah satunya dalam bentuk usulan dan masukan di PKK.

2. Alur penerimaan pesan dan saluran komunikasi

Alur penerimaan pesan di dalam PKK berkaitan dengan saluran komunikasi yang digunakan. Dalam hal ini, aliran informasi berjalan melalui saluran komunikasi non-media, yaitu melalui beberapa forum tertentu sebagai bentuk sosialisasi program kegiatan PKK. Forum-forum ini, antara lain yaitu: pertemuan rutin PKK Kelurahan, pengarahan khusus dari pengurus PKK, dan pertemuan kelompok PKK RT. Terkait dengan saluran komunikasi tersebut, muncul kembali konsep *opinion leader* Ibu RT dan Ibu RW, dimana posisinya adalah sebagai pemuka atau pemimpin pendapat dalam komunikasi.

3. Hambatan dalam penerimaan pesan

Adanya hambatan komunikasi dalam penerimaan pesan merujuk pada konteks personal, dimana keaktifan SDM pengurus dan anggota PKK dinyatakan kurang maksimal. Selain itu, pemahaman anggota PKK dalam menerima pesan informasi mengenai kegiatan PKK juga dinyatakan sebagai salah satu bentuk hambatan yang dapat mempengaruhi proses penerimaan pesan di PKK.

PKK, Identitas Gender, dan Pemberdayaan Perempuan

Santrock (2002) dalam Aulia (2014) menyebut gender sebagai identitas rasa yang dimiliki laki-laki serta perempuan. Konsep ini dipahami berkenaan dengan peran gender sebagai sebuah ekspektasi yang secara tidak langsung *merigidkan* posisi laki-laki dan perempuan, terutama dalam berpikir, bertindak, ataupun merasakan sesuatu. Berkaitan dengan peran gender tersebut, Aulia (2014) kembali mengarahkan identitas gender kepada bentuk stereotip gender sebagai keyakinan dan sikap dalam memahami konsep maskulinitas dan feminitas. Dengan kata lain, bagaimana seseorang meyakini identitas dan karakteristik gender yang melekat pada dirinya, hal ini akan merujuk pada cara individu terkait bermain atas peran gender yang dimiliki, sekaligus menempatkan pemahaman tertentu sebagai dasar stereotip gender yang diyakini.

Konstruksi identitas gender melalui pola komunikasi perempuan di gerakan PKK mengindikasikan bahwa PKK muncul sebagai gerakan yang menjalankan fungsi sosial

keperempuanan pada diri seorang perempuan. Munculnya fungsi dan peran sosial tersebut merujuk pada bentuk pemberdayaan yang diprogramkan melalui kegiatan PKK, apakah selanjutnya program terkait benar-benar memberdayakan perempuan seutuhnya, atau hanya sebatas pemberdayaan yang muncul dari pemerintah.

1. Menjalankan fungsi dan peran sosial keperempuanan melalui PKK

Menjalankan fungsi serta peran sosial keperempuanan melalui PKK dapat merujuk pada konsepsi bahwa perempuan diberi kesempatan dalam akses ekonomi keluarga. Program PKK berupaya memungkinkan perempuan untuk berkembang dan lebih diakui melalui peran sosialnya, sekaligus memunculkan upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan.

Namun demikian, hal ini tetap tidak melepaskan perempuan pada tanggung jawabnya di dalam pembinaan keluarga. Perempuan melalui PKK, justru semakin terkungkung dalam konsep ibuisme negara, dimana mereka dikonstruksi untuk dapat menjadi ibu sekaligus istri yang baik untuk membina pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Adanya kuantitas laki-laki (suami) dalam keanggotaan PKK cenderung kurang dan justru menjadi pemakluman yang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Melalui pemahaman ini, boleh jadi konsep patriarki pada akhirnya masih terasa di dalam gerakan PKK, dimana suami secara tidak langsung dipandang boleh untuk tidak terlalu bertanggung jawab di dalam pengelolaan rumah tangga sehingga tidak wajib mengikuti PKK.

Mengenai lingkup keluarga, posisi suami lebih dipercaya pada sejumlah sektor publik yang berkaitan dengan aspek penafkahan. Sedangkan istri atau ibu, lebih disubordinasi pada ranah domestik, salah satunya bertanggung jawab dalam pengelolaan keluarga dan rumah tangga, terlepas dari adanya kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk lebih aktif dalam mengakses aspek finansial di kehidupan keluarga. Inilah yang kemudian memperlihatkan dualisme peran serta tidak seimbang perlakuan bagi perempuan melalui dikotomi antara sektor publik dan domestik dalam kehidupan keluarga melalui PKK.

2. Bentuk pemberdayaan yang dimunculkan melalui PKK

Adanya konsep pemberdayaan di PKK secara sederhana merujuk pada pengkonstruksian perempuan sebagai sosok mandiri dan berprestasi di dalam masyarakat. Konteks ini menjadikan bentuk pemberdayaan selanjutnya ditekankan pada aspek ekonomi guna memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menciptakan identitas ekonominya secara mandiri. Pilihan ini akan mempengaruhi perempuan dalam berperan sosial secara lebih luas, yakni sebagai pengambil keputusan ekonomi dalam rumah tangga (Devi, 2014:91) sehingga secara positif, perempuan memperoleh daya kekuatan dalam kapasitas ekonomi dan pembangunan yang lebih terjamin (Devi, 2014:99).

Adapun bentuk pemberdayaan yang dapat diperoleh melalui PKK merujuk pada pengembangan kemampuan bagi perempuan, baik yang berkaitan dengan kemampuan mendasar seperti memasak, ataupun kemampuan terlatih dalam membuat keterampilan. Selain itu, perempuan juga dilatih untuk hidup berkoperasi melalui program UP2K PKK.

Terkait analisis di atas, konsep pemberdayaan yang diusung PKK pada akhirnya tidak terlepas dari upaya pembangunan negara. Mosse (2004) menjelaskan adanya pendekatan pemberdayaan yang muncul dalam pemahaman terhadap proses pembangunan atas sejumlah kebijakan untuk menyamaratakan porsi laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, konsep ini mengarah pada proses pembangunan negara dengan berlandaskan pada kesetaraan gender.

Gender and development lebih jelas dikenal sebagai konsep pemberdayaan holistik, dengan mempertimbangkan aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik berdasarkan relasi gender (Hendarso, 2011:8). Sesuai dengan perspektif ini, adanya pembangunan guna mewujudkan keluarga yang baik memerlukan adanya partisipasi laki-laki dan perempuan secara seimbang.

Thomas-Slayther, Esser, dan Shields (1993) dalam Jamal (2014:3) memandang kesetaraan gender sebagai tantangan tersendiri bagi pembangunan. Gender dan pembangunan secara bersamaan mengakui peran laki-laki dan perempuan sebagai dua pihak yang saling mendukung dalam praktik keluarga. Implementasi nyatanya adalah melalui beberapa kegiatan, seperti: persamaan gender dalam *micro-financing* serta pendidikan bagi perempuan. Lebih lanjut, pemikiran ini juga mengarah pada konsep *gender equality*, dimana menurut Sharma (2014:143-144), konsep ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dengan memberikan porsi haknya untuk merdeka, bebas menggunakan hak asasi, serta secara seimbang dan potensial mampu menjadi bagian dari masyarakat.

Pemberdayaan, gender, dan pembangunan, ketiganya menempatkan posisi perempuan untuk memerankan peran sosialnya di masyarakat, terutama dalam berkontribusi pada pembangunan negara. Terkait hal ini, gerakan PKK boleh jadi merupakan salah satu usaha perpanjangan pemerintah yang mampu memfasilitasi arah pemikiran tersebut.

Aspek lain yang mengarahkan posisi PKK terhadap pemberdayaan dan pembangunan adalah dengan menempatkan konteks keluarga sebagai sasaran utama PKK. Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat berkaitan erat dengan pembangunan. Hal ini dipahami bahwa ukuran kesejahteraan sebuah keluarga secara tidak langsung akan menjadi patokan dalam menentukan kesejahteraan negara. Dengan demikian, ketika sosok perempuan diharuskan berperan dan bertanggung jawab di dalam keluarga, secara tidak langsung perempuan turut menjadi bagian dari negara, dan melalui sifat keibuannya (*ibuisme*), sosok perempuan dipandang harus bertanggung jawab secara fisik, sosial, dan budaya terhadap pembentukan negara.

Masih mengenai konsep pemberdayaan, Ambar Teguh Sulistiyani (2004:77) mengidentifikasi proses pemberdayaan dalam beberapa tahapan: a) adanya kesadaran dan pembentukan perilaku sadar serta peduli guna menjalankan upaya peningkatan kapasitas diri; b) proses transformasi yang merujuk pada pengetahuan, kecakapan, serta keterampilan dalam mendukung peran perempuan dalam pembangunan; dan c) peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan guna membentuk sikap inisiatif dan inovatif bagi perempuan untuk mencapai kemandirian.

Menilik pada sejumlah kegiatan PKK, adanya karakteristik identitas gender PKK secara tidak langsung menjadikan perempuan sebagai sosok yang bertanggung jawab di dalam keluarga, menciptakan peran perempuan sebagai ibu dan istri yang baik untuk keluarga, mengelola rumah tangga, di samping juga turut bertanggung jawab terhadap kondisi perekonomian keluarga. Namun demikian, terjadi dualisme peran, dimana perempuan yang bekerja, secara bersamaan akan disibukkan dengan kewajiban untuk membina keluarga melalui keikutsertaannya di PKK. Pada dasarnya hal ini cukup memberatkan perempuan, meski pada kenyataannya mereka seolah nyaman dan menjadikan peran sosial ini sebagai bentuk tanggung jawab penuh yang memang harus dilakukan secara optimal.

Merujuk pada proses komunikasi yang terjadi, dalam kaitannya dengan pemberdayaan, muncul kesadaran dan upaya peningkatan kapasitas diri bagi para pengurus dan anggota PKK. Ini secara tidak langsung termanifestasi melalui sosialisasi nilai-nilai gender yang turut disampaikan melalui pesan komunikasi. Munculnya perubahan yang memungkinkan adanya peningkatan pengetahuan, kecakapan, serta keterampilan setiap pengurus dan anggota PKK, selanjutnya dapat terimplementasi melalui keikutsertaan mereka di dalam kegiatan PKK sehingga secara keseluruhan, program-program kegiatan PKK bermaksud mengarahkan bentuk pemberdayaan dengan mengoptimalkan peran sosial perempuan dalam proses pembangunan negara.

Meningkatkan intelektualitas dan keterampilan bagi perempuan adalah tahapan pemberdayaan guna mewujudkan perempuan yang inovatif. Kreativitas perempuan melalui gerakan PKK akan diuji guna menunjukkan apakah program yang dijalankan oleh PKK benar-benar mampu memberdayakan perempuan atau tidak. Tentu melalui sejauh mana implementasi dapat dilakukan oleh para anggota dan pengurus PKK terhadap program kegiatan PKK di dalam kehidupan keluarga guna mencapai kemandirian.

Namun demikian, muncul kontradiksi lain mengenai dikotomi konsep publik dan privat di dalam PKK, dimana pemisahan ini memperlihatkan bahwa laki-laki cenderung berada di wilayah publik, dibandingkan perempuan yang diberi tanggung jawab dalam wilayah domestik atas urusan rumah tangga. Lebih lanjut, menguatnya atribut gender yang melekat pada diri seorang perempuan melalui PKK, bahwa perempuan masih terbiasa menyandang sebuah status atas posisi suami dan bukan hasil dari pencapaiannya secara mandiri.

Pemahaman terkait pada akhirnya kembali mengingatkan keberadaan PKK sebagai gerakan nasional yang bekerja sesuai arahan pemerintah serta mengacu pada program bentukan pemerintah. Alhasil, kentara ketika budaya patriarki masih melandasi pelaksanaan program kegiatan di PKK. Muncul pemakluman dalam menjalankan tanggung jawab terhadap pengelolaan keluarga sehingga mengukuhkan subordinasi perempuan yang seolah tidak terasa bagi perempuan itu sendiri. Inilah yang menempatkan bentuk pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK hanya terhenti pada bentuk pemberdayaan dari negara, dan belum mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan perempuan seutuhnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Sejumlah kesimpulan yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini, adalah:

1. Pemahaman karakteristik identitas gender gerakan PKK dinyatakan lebih menonjol pada perspektif *Me* dibandingkan dengan perspektif *I*. Dalam analisisnya, identitas yang dikonstruksi melalui analisis *I* lebih mengarah pada sejumlah manfaat dan sisi positif keikutsertaan perempuan di PKK, Sebaliknya, analisis *Me* menjelaskan karakteristik identitas gender PKK dipahami sebagai bentuk tanggung jawab serta ketaatan atas apa yang harus dipenuhi oleh pengurus dan anggota PKK.
2. Penyampaian pesan oleh pengurus PKK sebagai komunikator secara garis besar dilakukan dengan strategi desain pesan retorika, dimana pesan disampaikan secara fleksibel sesuai kondisi guna menyesuaikan arah tujuan komunikasi sehingga mampu menciptakan konteks tertentu di dalam proses komunikasi. Lebih lanjut, terlepas dari sistem perencanaan secara *bottom-up*, adanya aliran pesan yang terjadi justru mengarah pada sistem *top-down*, mengingat PKK merupakan mitra pemerintah sehingga setiap pelaksanaan program harus mengacu pada arahan PKK Pusat.
3. Pesan diterima oleh anggota PKK dalam posisi *negotiativ*, dimana penerimaan pesan akan disesuaikan dengan pemahaman personal masing-masing anggota PKK. Terkait dengan alurnya, ini berkenaan dengan saluran komunikasi yang digunakan. Program disusun dan direncanakan sesuai dengan kondisi masyarakat, lalu disampaikan melalui saluran komunikasi non-media dalam bentuk forum komunikasi.
4. Kaitan dengan bentuk pemberdayaan perempuan, PKK sebagai mitra pemerintah diyakini menjadi agen pemberdayaan yang muncul atas dasar bentukan negara. Fungsi sosial perempuan cenderung terkungkung dalam konsep ibuisme negara, terlepas dari kesempatan yang diberikan negara terhadap aktualisasi diri perempuan di dalam keluarga. Namun demikian, hal ini justru semakin mengukuhkan budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan dalam lingkup domestik.

Saran

Sejumlah saran dapat disampaikan penulis untuk perbaikan bagi penelitian ini. Pertama, adanya penelitian kembali dalam kajian yang serupa, lebih luas agar dapat dianalisis dengan kajian teori yang lebih kritis, seperti: feminisme dan hegemoni. Mengingat hasil penelitian ini diakui belum merujuk sepenuhnya pada tingkat kekritisannya terhadap pembentukan identitas gender yang muncul di PKK.

Saran kedua, diharapkan penelitian mengenai PKK dapat lebih dikembangkan dengan analisis multilevel, didukung strategi penelitian serta data kuantitatif sebagai penguat analisis dalam konsep pemberdayaan yang dibahas. Mengingat sifat fenomena yang kasuistik, diharapkan lebih lanjut penelitian ini dapat dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda sehingga memungkinkan adanya hasil yang lebih relevan dan bervariasi.

Ketiga, bagi penggiat PKK agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembelajaran dalam penyusunan serta aplikasi program kegiatan PKK guna mencapai pemberdayaan yang maksimal. Optimalisasi pengurus PKK untuk menerapkan konteks komunikasi sosial agar proses penyaluran informasi dapat berlangsung secara lebih efektif bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan deskripsi bagi masyarakat untuk memaknai upaya pemberdayaan secara lebih kritis dan terbuka demi kesejahteraan keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulia, Frita (2014). "Studi Deskriptif *Help Seeking Behavior* Pada Remaja yang Pernah Mengalami *Parental Abuse* Ditinjau dari Tahap Perkembangan (Masa Awal Anak-anak – Masa Remaja) dan Identitas Gender". *Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3 No. 1.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design 2nd Edition: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication, Inc.
- Devi, S. Kavitha. 2014. "Micro Finance and Women Empowerment". *Global Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3. <http://gjms.co.in/index.php/gjms/article/view/161/174>. Diakses tanggal 13/10/2014.
- Hall, Stuart. 1980. "Encoding/Decoding." *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79*. London: Hutchinson. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.rlwclarke.net%2Fcourses%2FLLITS3304%2F2008-2009%2F06BHallEncodingDecoding.pdf&ei=W2HxVJTIEo3luQTDyIGIDw&usq=AfQjCNEt8IT7DYOsPT_qEt5iacPth_s8aQ&bvm=bv.87269000,d.c2E. Diakses tanggal 28/2/2015.

- _____. 1993. "Encoding, Decoding". Simon During (ed.). *The Cultural Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Jamal, Aamir. 2014. "NGOs, Participatory Development and Construction of Identities: Involving Men in Gender and Development (GAD) Programs in South Asia". *World Journal of Social Science*, Vol. 1 No. 2. <http://www.sciedu.ca/journal/index.php/wjss/article/view/4466/2557>. Diakses tanggal 13/10/2014.
- Kelan, Elisabeth K. 2008. "Discursive Theories of Gender." *Encyclopedia of Gender and Society*. SAGE Publications. 11 September 2009. <http://www.sage-reference.com/gender/Article_n115.html>.
- Miller, Katherine. 2005. *Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts 2nd Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Millie, Kimberly dan Patty-Jo Bellamy. 2014. "The Business Women's Association of Uzbekistan: A Qualitative Study of The Emergence and Potential Influence of Women's Leadership in Central Asia". *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, Vol. 1, No. 1. The Institute of Eastern Europe and Central Asia. <http://ieeca.org/wp-content/uploads/2013/04/JEECAR-Journal-Vol1-No1-Website.pdf#page=91>. Diakses tanggal 13/10/2014.
- Mosse, Julia Cleves. 2004. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Mulyana, Dedi. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKis.
- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations Third Edition*. New York: The Free Press.
- Sharma, Anju. 2014. "Realizing Gender Responsive Governance and Gender Equality Representatives in Democratic Society: A Concrete Situation of Women Empowerment and Participation in Politics". *International Journal of Information and Futuristic Research*, Vol. 2. <http://www.ijifr.com/pdfs/29-09-2014990V2-E1-041.pdf>. Diakses tanggal 13/10/2014.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryakusuma, Julia. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tim Penggerak PKK Pusat. 2010. *Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Wood, Julia T. 2000. *Communication Theories in Action 2nd Edition*. USA: Wadsworth Thomson Learning.